

GRATIS
TANPA IURAN

EDISI SELASA
8 AGT 2023



**JEJE GOVINDA MAJU NYALEG
DI TENGAH ISU PERSELINGKUHAN
BACA HALAMAN 5**



**UMUMKAN BACA WAPRES,
NASDEM MAUNYA LAST MINUTE,
DEMOKRAT-PKS INGIN KEPASTIAN**



Koalisi Perubahan untuk Persatuan memberi kewenangan penuh bagi Anies Baswedan memilih pendamping untuk maju dalam Pilpres 2024.

UMUMKAN BACAWAPRES, NASDEM MAUNYA LAST MINUTE, DEMOKRAT-PKS INGIN KEPASTIAN

KORANUSANTARA – Kesolidan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) tengah diuji. Penyebabnya, Partai Nasdem mengusulkan penentuan bakal cawapres pendamping Anies Baswedan selaku capres dilakukan di last minute atau menjelang penutupan pendaftaran. Namun, tidak demikian dengan dua mitra koalisinya, Partai Demokrat dan PKS.

Wacana pengumuman bacawapres pendamping Anies di menit terakhir itu disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Dia menyebut penentuan cawapres bisa meniru pertandingan sepak bola dunia. Satu atau dua gol di detik terakhir dapat mengubah hasil pertandingan. "Kami belajar dari situ. Jadi, pengumuman cawapres di akhir bukan karena koalisi

tidak solid," ungkapnya.

Memang, kata Paloh, ada desakan dari internal KPP dan eksternal agar Anies segera mengumumkan bacawapres. Dia pun meminta agar mereka sabar dan menunggu momen yang tepat. Mantan politikus Golkar itu juga mengutip pepatah kuno Inggris bahwa dari gelas ke bibir, masih banyak yang akan terjadi.

Namun, Paloh menegaskan, Nasdem tak pernah menekan Anies soal sosok bacawapres dan kapan harus diumumkan. Sebab, Nasdem sudah menjadi partai pertama yang mengumumkan bacapres. Karena itu, sekarang giliran partai lain. "Kami beri kesempatan partai lain untuk mendeklarasikan cawapresnya," ucap Paloh.

Sementara itu, Partai Demokrat berbeda pandangan.

Mereka tidak sepatutnya jika bacawapres pendamping Anies diumumkan di menit terakhir. Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, mungkin koalisi lain akan mengumumkan capres-cawapres pada menit terakhir, tapi KPP bisa menempuh langkah berbeda. "Capres Koalisi Perubahan harus mandiri menentukan sikap," tegasnya.

Di sisi lain, PKS menyerahkan penuh soal pengumuman bacawapres kepada Anies. Namun, jika boleh mengusulkan, Jubir PKS Muhammad Kholid meminta sebaiknya pengumuman bacawapres tidak dilakukan di menit terakhir pendaftaran Pilpres 2024. Sebab, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi bacapres maupun partai koalisi. (*)



Kadiv Hubinter Polri Irjen Krishna Murti dalam jumpa pers mengatakan bahwa Harun Masiku bersembunyi di dalam negeri.

POLRI SEBUT HARUN MASIKU MASIH DI INDONESIA

KORANUSANTARA – Polri mendeteksi bahwa Harun Masiku berada di Indonesia. Keberadaan tersangka dugaan suap terkait pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP tersebut disebut mulai mendapat titik terang setelah selama tiga tahun hilang dari peredaran. Hal tersebut diketahui dari data perlintasan orang yang keluar masuk Indonesia.

Informasi itu disampaikan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadiv Hubinter) Polri Irjen Krishna Murti. Hanya saja, dia tidak bisa menyebutkan secara detail sejak kapan Harun kembali ke Indonesia. "Setelah dia (Harun Masiku) keluar (negeri), dia balik lagi ke dalam (negeri)," ungkap Krishna ditemui di Gedung KPK, Senin, 7 Agustus 2023.

Krishna menjelaskan Harun terdeteksi hanya sehari berada di luar negeri. Namun, dia tidak menyebutkan secara spesifik negara mana yang dimaksud. Dia hanya memastikan bahwa informasi itu merujuk pada data perlintasan orang. "Jadi dia (Harun Masiku) sebenarnya bersembunyi di dalam (negeri), tidak seperti rumor (bersembunyi di luar negeri),"

terangnya.

Harun ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sejak 9 Januari 2020. Karena tak kunjung menyerahkan diri, calon legislatif (caleg) dari PDIP tersebut kemudian masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Selang enam bulan, Harun kemudian ditetapkan sebagai buronan internasional oleh Interpol.

Menanggapi informasi dari Polri, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut pihaknya akan mendalaminya. Menurut Ali, pihaknya juga fokus menyelesaikan dua perkara lain yang tersangkanya juga berstatus DPO. Yakni, Paulus Tannos dan Kirana Kotama. "Kami terus melakukan pengejaran tentu dibantu oleh Hubinter (Polri)," ujar Ali.

Secara teknis, Ali belum bisa menyampaikan apa saja upaya yang sudah dan akan dilakukan KPK untuk menangkap para buronan tersebut. Ali pun meminta masyarakat untuk melaporkan kepada KPK dan pihak kepolisian jika mendapatkan informasi terkait keberadaan Harun. "Pasti kami tindaklanjuti. Pencarian secara aktif pasti kami lakukan," imbuhnya. (*)



Pesanan atribut parpol meningkat saat tahun politik.

PENGUSAHA TEKSTIL BERHARAP RAUP UNTUNG DARI PEMILU

KORANUSANTARA - Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) meyakini, musim pemilu berpotensi meningkatkan pendapatan industri tekstil. Namun, pengusaha memprediksi euforia tersebut tidak akan dapat maksimal dirasakan mengingat kondisi industri dalam negeri yang cukup tertekan karena produk impor.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindawardana mengatakan, tahun politik kali ini berpotensi mendatangkan benefit bagi pelaku industri tekstil. "Meskipun nanti yang akan terdorong penjualannya ada kategori yang segmented. Misalnya,

kaos," ujarnya.

Permintaan domestik yang berpotensi terkatrol, menjadi harapan pelaku usaha untuk bisa mendorong kinerja tekstil. Sebab, dua tahun terakhir pada momen peningkatan terbesar yakni Lebaran, dinilai belum cukup untuk memulihkan penjualan.

Namun, Danang menyebutkan bahwa kondisi ekspor yang melemah saat ini juga menjadi situasi yang harus dihadapi pelaku usaha. Menurut dia, demand luar negeri belum ada perbaikan yang cukup signifikan mengingat negara-negara pembeli utama tekstil garmen fashion Indonesia sedang mengalami masalah ekonomi. "Seperti

Europa, Amerika, beberapa negara di Asia, mereka juga sedang tidak memiliki pertumbuhan yang bagus," ucapnya.

Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmadja menuturkan, sebanyak 70 persen hasil produksi tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri dipasarkan di domestik. Sehingga, banjir impor itu akan membuat sektor TPR terpuruk.

"Saat ini industri TPT tidak dapat berharap banyak pada permintaan luar negeri, akibat perekonomian negara tujuan sektor tekstil seperti Amerika Serikat dan Eropa masih terpuruk imbas perang Rusia-Ukraina," bebernya. (*)



JEJE GOVINDA MAJU NYALEG DI TENGAH ISU PERSELINGKUHAN

KORANUSANTARA – Ritchie Ismail alias Jeje Govinda jadi sorotan publik. Belum reda isu perselingkuhan sang istri, Syahnaz Sadiqah, Jeje dikabarkan maju sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2024.

Jeje membantah disebut memanfaatkan momentum tersebut untuk menaikkan Namanya. Sebab, menurut dia, keinginannya untuk bergabung sebagai kader PAN sudah dipikirkan sejak lama. Bahkan sebelum kasus perselingkuhan istrinya terkuak. "Cuma memang momennya aja (berbarengan)," kata Jeje, Senin, 7 Agustus 2023.

Dia menyatakan telah menutup kasus tersebut. Dan kini sudah memulai kehidupan baru bersama sang istri tanpa melihat masa lalu. "Kan kita memang harus melupakan. Saya nggak punya dendam sama siapa pun. Berat, ya pasti, cuma insyaallah bisa lewat ini," ucap dia.

Jeje menyatakan bahwa kondisi

rumah tangganya sudah membaik. Hubungannya dengan Syahnaz justru kini semakin baik setelah tertimpa masalah tersebut. Syahnaz juga mendukung penuh keputusannya untuk melebarkan sayap ke dunia politik. "Alhamdulillah, sekarang semakin harmonis, semakin mesra juga ya. Syahnaz full support saya punya dunia baru, yang penting jangan macam-macam," beber Jeje.

Sebagaimana diketahui, kasus perselingkuhan Syahnaz dengan Rendy Kjaernett dibongkar Lady Nayoan pada Juni lalu. Syahnaz dan Rendy disebut telah menjalin hubungan terlarang sejak satu tahun terakhir. Keduanya juga sudah mengakui sekaligus meminta maaf kepada pihak keluarga masing-masing. Namun, berbeda dari Syahnaz, rumah tangga Rendy kini di ambang perpisahan. Sebab, Lady melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Bekasi pada 10 Juli.(*)



PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



BUNTUT GAJI RP 18 MILIAR TAK DIBAYAR

**BURUH PETI KEMAS
SAMARINDA ANCAM
TUTUP PELABUHAN
BACA HALAMAN 2-3**



**15.110 ORANG MAINKAN
ANGKLUNG DI GBK, INDONESIA
PECAHKAN REKOR DUNIA**

BACA HALAMAN 38-39



Suasana demo yang dilakukan Buruh Komura di depan PN Samarinda.

Buntut Gaji Rp 18 Miliar Tak Dibayar

Buruh Peti Kemas Samarinda Ancam Tutup Pelabuhan

SAMARINDA-Sebanyak seribumassa yang merupakan buruh peti kemas di Samarinda menggelar aksi demo, menuntut pembayaran upah atau gaji dengan total nilai Rp 18 miliar yang tak kunjung dibayarkan selama 7 tahun.

Aksi demo ini dilakukan di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Samarinda pada Senin (7/8/2023). Dalam tuntutannya, para pendemo pun mengancam akan menutup akses kegiatan bongkar muat di pelabuhan Samarinda.

Koordinator Lapangan Buruh Komura, Hambali mengatakan, aksi demo ini dilakukan sebagai bentuk pengawalan tuntutan para buruh ke PN Samarinda yang saat ini tengah menangani PT Pelabuhan Samudera Palaran (PSP).

Lanjutnya, pihaknya meminta PT PSP agar mematuhi putusan Perdata Nomor 75/Pdt.G/2019/PN.Smr, tanggal 16 April 2020, yang belum juga dilaksanakan.

"Intinya seperti ini apabila tuntutan kami tidak dipenuhi dari pengadilan negeri Samarinda maupun PT PSP, kami akan menurunkan massa yang lebih besar lagi dan kami akan menutup akses kegiatan bongkar muat dari pelabuhan Samarinda sampai Muara Berau," ucap Hambali.

Aksi demo ini digelar di dua lokasi, di Pengadilan Negeri Samarinda dan kantor PT PSP yang berada di Kecamatan Palaran pada Senin pagi. Dalam aksi itu para pendemo menuntut 6 poin tuntutan yang mana intinya meminta pihak PT PSP membayar sisa uang gaji para buruh.

"Kasus kami ini sudah berjalan 7 tahun. Tidak ada titik terang dan tidak ada itikad baik dari PSP. Harapan kami, dari pihak PSP agar segera sukarela untuk membayar sebelum ada eksekusi pada PN Samarinda," ungkapnya.

Diketahui, kasus PT PSP ini telah berjalan sejak medio 2019 silam. PT PSP telah kalah dalam pengadilan tingkat pertama di pengadilan negeri hingga putusan kasasi yang mana PT PSP terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan diwajibkan membayarkan gaji TKBM Komura yang belum dibayar.

"Dan berdasarkan putusan PK Nomor: 102 PK/Pdt/2023 tanggal, 23 April 2023, PT.PSP tidak lagi memiliki upaya hukum yang dapat dilakukan



dan harus melaksanakan putusan yang telah inkrah," jelas Hambali.

Selain itu, Hambali mengungkapkan aksi demo ini merupakan tuntutan dari pernyataan pihak perusahaan yang menyatakan tidak akan ada pembayaran upah buruh. Dengan alasan masalah PT PSP merupakan kerugian negara.

"Saya melihat etiket baik dari pada PT PSP tidak akan menjalankan perintah putusan PK. Dan tidak akan menjalankan pembayaran sedikit pun," paparnya.

"Itu saya ada dengar statement dari pihak PSP yang menyatakan sepeserpun kami tidak akan membayarkan ke komura (buruh)," sambungnya.

Terpisah, Panitera PN Samarinda Hadi Riyanto menguraikan pihaknya telah memanggil perwakilan PT PSP untuk melakukan eksekusi un-

tuk melakukan pembayaran sesuai putusan PK yang telah inkrah.

"Sudah kita tindak lanjuti, pihak selanjutnya kita memanggil pemohon kemudian kita tegur dan diberikan waktu untuk melaksanakan itu (pembayaran)," sebut Hadi.

Selain itu, ia juga mengungkapkan konflik PT PSP dan TBKM Komura sebenarnya sudah mendapatkan putusan inkrah dari Pengadilan Negeri Samarinda di mana dari hasil itu perusahaan diwajibkan membayar gaji yang belum dibayar.

"Dan sebetulnya dari tahapan-tahapan eksekusi ini sudah ditindak lanjuti pengadilan, bahkan pengadilan memanggil pihak termohon dan pemohon untuk melaksanakan eksekusi segera secara sukarela," pungkasnya. (vic)





DANDIM CUP KEJURPROV SERI 3 2023

**BEST TIME
TROPHY
DAN UANG
PEMBINAAN**

**HADIAH
UTAMA
MOTOR
MATIC**



KOLONEL CZI EKO SUPRI SETIAWAN, S.SOS., M.HAN
DANDIM 0901/SAMARINDA

H. SYAHRIL SARAPING
KETUA IMI KALTIM



SAFETY RIDING



LOMBA DRAG BIKE



TALKSHOW KEREN



LOMBA MODERN DANCE



LIVE MUSIC



LOMBA 17 AGUSTUS



LOMBA FASHION SHOW



JALAN SANTAI



KULINER UMKM

SAFETY RIDING & DRAG BIKE

26-27 AGUSTUS 2023
EX BANDARA TEMINDUNG SAMARINDA

JALAN SANTAI



DOOR PRIZE !!!



PRESENT BY :



SUPPORTED BY :



MEDIA PARTNER :



INFORMASI DAN PENDAFTARAN :

EZA : +62 822-5560-6039
MAULIDANI : +62 857-5134-4384
AYA : +62 831-4400-8571



Kaltim Bersinergi Mengentaskan Desa Tertinggal Menuju Pembangunan Berkelanjutan

BALIKPAPAN - Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyiapan Bahan Kebijakan tentang Pengentasan Desa Tertinggal di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan tema "Kebijakan Peningkatan Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang dan Desa Mandiri".

Rapat Koordinasi (Rakor) tersebut dilangsungkan di Hotel Swiss-Bell Balikpapan pada Senin (7/8/2023). Acara ini dibuka oleh Kepala Bagian Non Pelayanan Dasar Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur, Juraidi, dihadiri oleh perwakilan dari Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di lingkungan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Juraidi yang mewakili Plh. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kalimantan Timur membacakan sambutan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur menyambut baik diselenggarakannya kegiatan ini sebagai wadah koordinasi, monitoring dan evaluasi dalam penyiapan bahan kebijakan tentang pengentasan desa tertinggal di Kalimantan Timur.

Pada kesempatan ini, Gubernur menyampaikan beberapa hal penting. Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari 841 Desa, 197 Kelurahan dan 103 Kecamatan. Hasil pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan penambahan 49 desa berstatus mandiri dari IDM tahun 2021.

Saat ini, sudah ada 136 Desa Mandiri, dengan 37 desa meningkat dari tahun 2021 menjadi sebanyak 349 Desa. Desa Berkembang berjumlah 339 Desa, berkurang 48 desa dari tahun 2021. Sementara itu, Desa Tertinggal berjumlah 17 Desa, mengalami penurunan 37 desa dari tahun 2021 dan tidak ada desa yang sangat tertinggal, mengalami penurunan 1 desa dari tahun 2021.

Dari 17 Desa yang masih tertinggal, sebagian besar berada di Kabupaten Berau (1 desa), Kabupaten Kutai Timur (2 desa), Kabupaten Kutai Barat (6 desa), dan Kabupaten Mahakam Ulu (8 desa). Berdasarkan data jaringan dan komunikasi yang dikumpulkan melalui Tenaga Pendamping Profesional, Tahun 2022 masih terdapat sebanyak 509 titik desa blankspot dan 177 titik desa low signal di Provinsi Kalimantan Timur.

Pemerintah telah mengatur daerah tertinggal dalam PERPRES Nomor 131 tahun 2015 yang mencakup berb-

agai aspek mengenai daerah tertinggal, kriteria, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun, Indeks Desa Membangun adalah indeks Komposit yang dibentuk oleh Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Desa Berkembang (Desa Madya) adalah Desa yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, akan tetapi belum secara optimal mengelolanya. Di sisi lain, Desa Mandiri adalah desa yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pembangunan desa dan memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya. Desa mandiri tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, tetapi juga mampu mengembangkan potensi dan sumber daya yang ada di desanya.

Semua kebijakan terhadap penanganan desa tertinggal ini harus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat desa itu sendiri. Keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat adalah kunci utama untuk mencapai hasil yang optimal.

Acara juga dihadiri oleh perwakilan dari Diskominfo Kaltim, antara lain Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi Dan Persandian, Dianto, dan Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi Diskominfo Kaltim Eva Yusefa. ([adv/diskominfokaltim](#))





APEL PAGI: Sekprov Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP memberikan pengarahan pada apel pagi, Senin (7/8).

Sekprov Beri Motivasi Pegawai

TANJUNG SELOR-Apel pagi di awal bulan Agustus, Senin (7/8/2023) di lingkungan Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) dipimpin oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov), Dr. H. Suriansyah, M.AP, Senin (7/8). Sesuai jadwal, petugas apel kali ini dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Pada kesempatan ini, Sekprov Kaltara memberi semangat dan mengingatkan terkait disiplin kerja para pegawai. Selain itu, terdapat beberapa arahan yang disampaikan Sekprov Kaltara terhadap jajaran saat ini.

Pertama, menyangkut keikutsertaan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Pendidikan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI bekerjasama dengan BPSDM se-Indonesia.

Sekprov Kaltara berpesan agar fokus, dengan tetap menjalankan tu-

gas yang telah tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Ia menegaskan, agar peserta tidak melupakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Setiap ASN, kata Sekprov, harus mampu melaksanakan fungsi, tugas, dan peran demi kepentingan negara dan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.

Untuk itu, keikutsertaan peserta dalam PKN Tingkat II nantinya jangan sampai mengganggu jalannya tugas pemerintahan.

"Dengan kata lain bahwa pegawai ASN disertai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan," ujar Sekprov Suriansyah.

Selain itu, Sekprov Suriansyah juga menyampaikan terkait Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam hal ini, perangkat daerah diwajibkan untuk membelanjakan 30 persen dari

DPA untuk membeli produk dalam negeri. Komitmen ini menunjukkan komitmen pemerintah di daerah untuk mendukung perekonomian lokal dan memajukan industri dalam negeri.

Sementara itu, dalam menghadapi perubahan iklim yang semakin cepat, Sekprov kembali menegaskan pentingnya kesiapsiagaan dalam mengantisipasi bencana.

Sekprov meminta dinas terkait yakni, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kehutanan (Dishut), Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara untuk selalu siap siaga dalam menghadapi potensi bencana, termasuk kebakaran yang baru-baru ini terjadi di Kota Tarakan.

"Mudah-mudahan kedepan semangat kerja kita lebih meningkat lagi," pungkas Sekprov Suriansyah. **(dkisp)**



BERIKAN ARAHAN: Wagub Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si memberikan arahan pada Sosialisasi Tata Kelola Perkebunan Sawit melalui Aplikasi SIPERIBUN, Senin (7/8).

Kehadiran Perusahaan jadi Atensi Wagub

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Yansen TP, M.Si memberikan atensi terhadap kehadiran perusahaan di Kaltara. Hal ini bertujuan bagi pemerintah dalam mendorong pembinaan dan sinergitas pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang telah dilakukan.

Hal ini juga disampaikan pada Sosialisasi Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit melalui Pelaporan Mandiri ke Dalam Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Perkebunan dan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.

Menurutnya, kehadiran perusahaan kelapa sawit ini memiliki peran penting dalam upaya pembangunan. Sehingga upaya harus ada sinergitas antara pemerintah dan perusahaan dalam menjalankan tugasnya masing-

masing.

“Sudah kurang lebih dua tahun ini, kita ini selalu berharap kehadiran sawit ini tentu maksimal,” kata Wagub.

Sosialisasi yang dibuka langsung oleh Wakil Gubernur (wagub) Dr. Yansen TP, M. Si ini dihadiri oleh unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), para asisten dan kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemprov Kaltara, dan para pimpinan/perwakilan Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit se-Kaltara.

Diketahui sawit merupakan salah satu komoditas terbesar dan mempunyai potensi strategis dalam mendukung perekonomian suatu daerah dan secara khusus di masyarakat.

Oleh karena itu, diharapkan perusahaan sawit proaktif menghadirkan di-

rinya sebagai kekuatan ditengah-tengah masyarakat.

“Saya harapkan supaya bangunlah sinergitas kinerja perusahaan masing-masing dalam menata kelola perkebunan dengan daerah/lingkungan di mana berada,” tegasnya.

Menurutnya, jika komunikasi berjalan sinergis, maka persoalan di masyarakat pasti dapat diselesaikan. Dalam hal ini, pemerintah berharap, perusahaan-perusahaan yang ada wajib melakukan pelaporan secara mandiri.

Dari pemerintah, menginginkan adanya kreativitas masing-masing perusahaan untuk bagaimana bekerja agar kontribusi besarnya dapat terserap baik oleh pemerintah dan kembali ke daerah. **(dkisp)**



INFLASI: Sekprov Suriansyah bersama TIPD Kaltara, mengikuti rapat Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin langsung oleh Mendagri RI, Tito Karnavian, Senin (7/8/2023).

Tantangan Hadapi Perubahan Iklim

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.AP., secara daring mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah (PID) Tahun 2023 berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Kantor Gubernur Kaltara, Senin (7/8/2023). Rapat itu dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian.

Diketahui sebelumnya, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan bahwa inflasi bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk perubahan iklim yang berfokus pada dampak El Nino dan IOD+. Fenomena El Nino dan IOD+ ini memiliki pengaruh besar terhadap inflasi di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Dwikorita mengungkapkan bahwa fenomena El Nino dan IOD+ membawa dampak buruk bagi banyak negara, termasuk kegagalan panen, ketersediaan air bersih yang minim, dan meningkatnya risiko kebakaran hutan yang disebabkan oleh pemanasan global. Data menunjukkan

bahwa fenomena El Nino dan IOD+ terjadi selama Agustus hingga September 2023.

Kemunculan El Nino dan IOD+ kini lebih sering terjadi, yaitu setiap 2-3 tahun sekali, dibandingkan dengan tahun 80-an yang terjadi setiap 7 tahun sekali. Hal ini menyebabkan rentan terjadinya kekeringan dan pemanasan global. Namun, analisis dan Prediksi ENSO menyatakan bahwa El Nino dan IOD+ yang terjadi di Indonesia pada periode ini tergolong dalam kategori moderat dan lemah. Hal ini disebabkan oleh wilayah perairan Indonesia yang luas sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh fenomena tersebut.

Mendagri Tito Karnavian menyampaikan, perubahan cuaca El Nino yang ekstrim akan sangat berpengaruh terhadap gerak inflasi di semua kabupaten kota tanpa terkecuali, perlu langkah antisipasi sejak dini terhadap potensi dampak kekeringan. Menurutnya, perubahan pasokan bahan pangan berakibat pada penurunan minat beli, yang menyebabkan inflasi meningkat.

"Ini ada cuaca ada El Nino, yang panas, dampak Elmino di beberapa

negara sangat berpengaruh," ucapnya.

Mendagri Tito juga meminta setiap daerah untuk mengecek ketersediaan Gudang Bulog menyangkut produksi. Apabila dirasa tidak cukup agar segera mengambil langkah antisipasi.

Saat ini, lanjut Tito, berdasarkan data evaluasi Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi pada Juni 2023 sebesar 0,21 persen (mtm), year to year (yoy) sebesar 3.08 persen. Di mana, terdapat 77 kota mengalami inflasi dan 13 kota mengalami deflasi.

Sementara penyumbang inflasi berdasarkan wilayah di Pulau Kalimantan yaitu Balikpapan (0,53 persen), Tarakan (0,36 persen), Samarinda (0,34 persen), Tanjung Selor (0,34 persen), dan Sampit (0,26 persen). Adapun penyumbang inflasi dari bulan Juni ke Juli terdiri daging ayam ras, cabai merah, bawang putih dan telur ayam ras.

Sekprov Kaltara, menanggapi dengan sigap dan akan segera berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam penanganan inflasi dampak cuaca El Nino. (dkisp)



SYAKURAH/RADAR BONTANG

Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam

Andi Faizal: Kunjungan Komisi V DPR RI Momentum Penting Catat Aspirasi Warga Bontang

BONTANG - Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyambut baik kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Kota Bontang pada Senin (8/8/2023). Kunjungan ini merupakan bagian dari Reses DPR RI Dalam Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023 dan bertujuan meninjau infrastruktur dan transportasi di Kota Bontang.

Andi Faizal mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Komisi V DPR RI yang telah memilih Kota Bontang sebagai tujuan reses kali ini.

Menurutnya, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk mendengarkan dan mencatat aspirasi masyarakat Bontang dalam rangka pembangunan kota.

"Seluruh aspirasi yang telah diberikan, sudah dicatat dan nantinya

akan dibahas dalam anggaran perubahan APBN murni. Hal ini bertujuan agar aspirasi tersebut dapat direalisasikan untuk memenuhi kebutuhan prioritas masyarakat," beber Andi Faizal.

Ketua DPRD Bontang ini juga menyoroti beberapa hal yang menjadi fokus peninjauan dalam kunjungan Anggota DPR RI, seperti jalanan depan RSUD yang direncanakan dipangkas karena sering memakan korban jiwa, wilayah Bontang Kuala yang kerap mengalami banjir, dan wilayah Selambai, Kelurahan Loktuan, yang direncanakan untuk pengembangan wisata nelayan.

Andi Faizal berharap, kunjungan ini dapat mendorong Komisi V DPR RI untuk segera membantu masyarakat

Bontang dalam peningkatan infrastruktur dan transportasi. "Karena APBD kita juga terbatas, kami berharap Komisi V DPR RI dapat segera membantu masyarakat Bontang dalam peningkatan infrastruktur dan transportasi," bebernya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Irwan mengatakan bahwa Kalimantan khususnya Kota Bontang ini merupakan Kota yang paling berpengaruh dalam pembangunan Republik Indonesia sehingga pembangunan infrastruktur harus dibenahi.

"Sumber Daya Alam di Kalimantan sudah dikirim ke seluruh Indonesia, dan juga sebentar lagi akan menjadi kota penopang IKN sehingga infrastruktur dan transportasi akan dibenahi kembali," pungkasnya. (ADV)



YUSVA ALAM

RDP Komisi I DPRD di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat Dewan.

Pekerjaan Dianggap Gagal, PT CBN Putus Sepihak PT STU

BONTANG – Terjadi permasalahan hubungan kerja antara perusahaan asal Jakarta, PT Cipta Bangun Nusantara (CBN) dengan perusahaan lokal PT Sriwijaya Teknik Utama (STU). Hal itu diketahui dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bontang, Senin (7/8/2023) yang diadakan di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Bontang.

Latar belakang permasalahan tersebut diawali dari CBN yang mendapat kontrak kerja dari PT Pupuk Kaltim, berupa proyek perbaikan tanki air. Lalu CBN menunjuk STU selaku perusahaan lokal untuk menjadi rekanan sebagai sub kontraktor.

Permasalahannya adalah CBN baru membayar pengerjaan tersebut kepada STU sebesar 77 persen. Sementara sisa 23 persennya belum

dibayar sampai saat ini.

“Kami sudah upaya negosiasi untuk dapat diselesaikan masalah ini, namun tak ada itikad baik dari CBN. Bahkan kami diputus sepihak,” ujar Legal STU, Caka Adi Pawoko.

Sementara itu, Project Manager dan Quality Control CBN Bontang, Suprpto menjawab keluhan tersebut.

Alasan CBN memutuskan sepihak lantaran CBN sudah mengirimkan surat teguran dan surat peringatan beberapa kali. STU juga dianggap tidak melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan. Ditambah lagi dengan hasil pengerjaan yang buruk.

“Kami tidak begitu saja memutus pekerjaan, namun sudah memberikan peringatan,” ujarnya sembari membacakan pesan dari legal CBN

pusat melalui whatsapp.

Usai mendengarkan uraian permasalahan dari berbagai pihak, termasuk PT Pupuk Kaltim selaku pemberi kerja dan juga Dinas Tenaga Kerja, Ketua Rapat, Maming meminta ketiga pihak untuk berembuk internal mencari penyelesaian. Ketiganya setuju untuk membahas permasalahan itu secara internal.

Maming juga mengatakan PKT tidak bisa lepas tangan terhadap masalah tersebut. PKT akan bisa mengalami kerugian jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan.

“Ingat bahwa DPRD ini hanya fasilitator bukan pengambil keputusan. Semoga ada solusi kekeluargaan dari ketiganya,” pungkas Maming menutup rapat. (adv/al)





Mabuk, 11 Pemuda Dihukum Push Up dan Bersihkan Sampah

BONTANG – Segerombolan pemuda kedatangan mabuk-mabukkan di Lapangan Kampung Baru, Minggu (6/8/2023). Tim patroli yang mendapati perbuatan mereka pun lantas memberikan hukuman.

Tim patroli yang terdiri dari Bhabinkamtibmas Berbas Tengah bersama FKPM Berbas Tengah, serta 3 pilar di wilayah Kelurahan Berbas Tengah kerap melaksanakan patroli rutin, guna menjaga keamanan wilayahnya.

Patroli kali ini mengambil rute Jalan Zamrud, Jalan Sultan Hasanuddin, Jalan Merah Delima hingga ke perbatasan bufferzone, yaitu Lapangan Kampung Baru.

Saat tiba di Lapangan Kampung Baru, tim patroli mendapati sekelompok pemuda sedang meminum alkohol jenis anggur dan satu botol merk kawa



ISTIMEWA

Tim patroli saat menghukum push up pemuda mabuk.

kawa. “Mereka berasal dari Desa Santan Kabupaten Kutai Kartanegara dan km 7 Jalan Poros Bontang – Samarinda,” ujar Aipda Rudiantoro, Bhabinkamtibmas Berbas Tengah, mengutip dari situs polresbontang.com.

Tim patroli pun mengambil sikap terhadap 11 pemuda tersebut. Den-

gan memberikan pembinaan serta sanksi sosial, berupa push up serta membersihkan sampah yang berserakan di sekitar Lapangan Kampung Baru. “Untuk sementara mereka kami bina dan kami catat identitasnya, agar tidak mengulangi perbuatan yang sama,” pungkasnya. (hms)

Pondok Dirusak Orang Tak Dikenal, Polres Tingkatkan Patroli di Bonles

BONTANG – Pasca kejadian pengrusakan sebuah pondok/vila di areal hutan lindung Kelurahan Bontang Lestari, Polres Bontang meningkatkan patroli di kawasan tersebut.

Mengutip dari situs Polresbontang.com, Kapolres Bontang AKBP Yusep Dwi Prastiya pun turun langsung memimpin patroli yang dilaksanakan, Minggu (6/8/2023) pukul 11.30 wita.

Didampingi para PJU, AKBP Yusep mengecek lokasi pondok/vila yang dirusak serta sepeda motor yang dibakar oleh orang tak dikenal di areal hutan lindung RT 01, Kelurahan Bontang Lestari.

Dalam arahnya Kapolres Bontang menekankan kepada Personil Polsek Bontang Selatan dan Personil Sat Samapta, agar lebih intensif berpatroli di areal tersebut, dimana menjadi sengketa antara dua kelom-



IST

Kapolres Bontang saat turun langsung mengecek kondisi pasca pengrusakan.

pok tani.

“Jangan berbuat hal-hal yang dapat merugikan kedua belah pihak ataupun orang lain. Jaga kamtib-

mas tetap kondusif,” pesannya kepada kelompok tani yang bersengketa. (hms)



TOTAL HADIAH JUARA
BELASAN JUTA!

11-13
AGUSTUS
2023

OPEN TOURNAMENT MINI SOCCER MEDIA KALTIM CUP



WAKTU PENDAFTARAN : 5 JULI - 3 AGUSTUS 2023 (1 BULAN)
TECHNICAL MEETING : 5/6 AGUSTUS 2023



PELAKSANAAN 11-13 AGUSTUS 2023:
1. JAM 08.00-11.00 WITA (PAGI)
2. JAM 15.00-18.00 WITA (SIANG)



LOKASI : LAPANGAN FATMA MINI SOCCER
JALAN PESUT, KELURAHAN TIMBAU TENGGARONG
UANG PENDAFTARAN : RP 1.000.000
KUOTA TERBATAS : 16 TIM
HADIAH : TOTAL HADIAH BELASAN JUTA RUPIAH



JUARA 1 : PIALA + MEDALI + UANG PEMBINAAN
JUARA 2 : PIALA + UANG PEMBINAAN
JUARA 3 : PIALA + UANG PEMBINAAN
BEST PLAYER : PLAKAT + UANG PEMBINAAN
TOP SCORER : PLAKAT + UANG PEMBINAAN
BEST GOALKEEPER : PLAKAT + UANG PEMBINAAN



CONTACT PERSON :
KANG MOEZ :
0822 5576 2256
RAFI' :
0822 5079 0691





Bupati Berau Sri Juniarsih saat melakukan demonstrasi buang sampah plastik di bank sampah.

Bupati Berau Ajak Masyarakat Pilah Sampah

TANJUNG REDEB - Bupati Berau Sri Juniarsih mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk mulai memilah sampahnya agar lebih mudah untuk didaur ulang. Terutama limbah rumah tangga dan limbah plastik.

Itu disampaikannya ketika memimpin Apel Peringatan Hari Lingkungan Hidup sedunia tahun 2023 di SMAN 5 Berau, Senin (7/8/2023).

Dijelaskannya, Pemerintah menargetkan bisa mengurangi sampah sebesar 30 persen di tahun 2025 dan dapat menangani tumpukan sampah. KLHK juga terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah.

"Inisiatif melalui gerakan-gerakan untuk mengurangi sampah plastik pun terus tumbuh di tengah masyarakat," katanya, Senin (7/8/2023).

Untuk menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan tidak hanya sekedar daur ulang sampah. Tapi perlu ekonomi sirkular yang merupakan konsep memaksimalkan nilai penggunaan suatu produk dan komponennya secara berulang, se-

hingga tidak ada sumber daya yang terbuang.

"Mari kita menggalakkan berbagai langkah dan upaya untuk mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat," ajaknya.

"Kalau tidak dari sekarang maka akan memberikan dampak negatif bagi generasi ke depan," imbuhnya.

Ia juga menekankan agar masyarakat juga memanfaatkan 24 bank sampah yang ada di Kabupaten Berau. "Bank sampah sudah ada sejak lama, tinggal masyarakat yang lebih serius karena bisa bernilai ekonomis. Di sisi lain masyarakat juga akan merasakan lingkungan yang bersih," ungkapnya.

Pihaknya juga memberikan sejumlah penghargaan sebagai bentuk apresiasi kepada berbagai pihak yang berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Mulai dari kampung, sekolah hingga perusahaan di Bumi Batiawakkal.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Mustakim Suharjana menyebut, tumpukan sampah yang ada di Kabupaten

Berau pada 2022 sebanyak 49.801 ton. Rata-rata sampah yang dihasilkan masyarakat yakni 136,44 ton per hari. Sumber sampah selain sisa makanan, 26,74 persen bersumber dari sampah plastik.

Adapun capaian pihaknya dalam pengelolaan sampah tersebut meliputi, pengurangan sampah sebanyak 19,55 persen, penanganan sampah 50,07 persen dan sampah tidak terkelola sebanyak 30,38 persen.

"Dengan jumlah petugas kebersihan yang bersinggungan langsung dalam penanganan dan pengelolaan sampah sebanyak 268 orang," bebernya.

Diakuinya, capaian program kegiatan lingkungan, khususnya dalam pengelolaan sampah belum maksimal. Dan belum sepenuhnya mencapai target. Apalagi tantangan pengelolaan sampah yang dihadapi cukup berat, namun harus tetap optimis dapat menghadapi dan melewatinya dengan baik.

"Saya ingin mengajak kita semua untuk bersama-sama berkomitmen, serta mencari solusi terbaik untuk dapat menangani permasalahan sampah yang ada," tutupnya. (mnz)



IST

Suasana pemadaman api di Kampung Labanan Makarti.

Tak Ada Hentinya, Karhutla Kembali Terjadi di Labanan Makarti

TANJUNGREDEB-Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kembali terjadi di Kampung Labanan Makarti, Senin (7/8/2023) sekira pukul 13.30 Wita.

Danru Pos Dalkarhutla Labanan, Dwi Susilo mengatakan, pihaknya menerima laporan dari masyarakat sekitar pukul 14.10 Wita dan jajaran pemadam kebakaran tiba di lokasi sekira pukul 14.30 Wita.

"Kebakaran lahan di Kampung Labanan Makarti ini seperti tidak ada hentinya, saya harap di musim kemarau seperti ini jangan ada oknum yang membuka lahan dengan cara membakar," ungkapnya kepada media kaltim.com.

Dia memaparkan, si jago merah berhasil melahap lahan seluas kurang lebih 3 hektare. Beruntung di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP) tidak ada rumah masyarakat.

"Tidak ada rumah yang terbakar dan korban jiwa dalam kejadian ini," katanya.

Dirinya menyebut, lahan seluas 3 hektare yang menjadi amukan api berstatus milik masyarakat. Mengenai kerugian, kata Dwi, belum diketahui secara pasti.

"Dalam memadamkan api, kami hanya menurunkan satu unit mobil pemadam kebakaran," ujarnya.

Dwi membeberkan, pihaknya se-

dikit kesulitan dalam menjinakkan si jago merah. Pasalnya, di TKP terdapat semak belukar, pepohonan serta akses jalan yang sempit.

"Tetapi berkat bantuan tim terkait serta masyarakat api berhasil kami padamkan," imbuhnya.

Kendati demikian, dirinya berharap ada penambahan personel pemadam kebakaran. Sebab, saat ini personel yang ada jumlahnya sangat terbatas.

"Semoga menjadi perhatian, apalagi di Posko Labanan ini tidak ada istirahat karena kebakaran terus terjadi," pungkasnya. (dez)



Apel gabungan awal bulan Agustus di halaman Kantor Bupati Berau dipimpin Pj Sekda Berau, Agus Wahyudi.

Sudah Agustus, Serapan Anggaran Baru 40 Persen

TANJUNG REDEB - Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Berau, Agus Wahyudi mengingatkan kembali kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengejar realisasi anggaran tahun ini. Pasalnya hingga Agustus ini, serapan anggaran baru sekitar 40 persen saja.

"Serapan anggaran kita baru masuk kepala 3 atau sekitar 40 persen saja. Padahal sekarang sudah Agustus," katanya, saat memimpin apel gabungan awal bulan Agustus di halaman Kantor Bupati Berau, Senin (7/8/2023).

Menjadi komitmen bersama untuk mengoptimalkan serapan anggaran dan harus diselesaikan sesuai porsi. Dirinya juga menyayangkan tingginya silpa tahun lalu dan menjadi sorotan banyak pihak. Tentu ada sisi positif dan negatif dari adanya silpa tersebut.

Menurutnya, tidak semua silpa itu dampaknya negatif. Jika memang program kerja tidak dilaksanakan dan tidak ada kondisi tertentu baru menandakan kinerja pemerintah daerah buruk.

"Apabila ada penghematan itu bagus. Target semua tercapai dan masih ada sisa," ucapnya.

Namun, tingginya Silpa tahun lalu salah satunya yakni, Silpa DBH-DR yang mencapai Rp 120 miliar karena masuk terakhir, sehingga OPD terkait kesulitan untuk mengelolanya. Ditambah pembayaran Multi Years Contract (MYC) rumah sakit (RS) baru.

"Jadi tolong dipacurealisasi anggaran kita. Yang belum lelang-lelang tolong disegerakan. Karena UKPBJ Berau siap saja melelang, tergantung kesiapan OPD. Kalau sudah lengkap berkasnya langsung dilelang," terangnya.

Di samping itu, Agus juga menam-

bahkan terkait perbaikan Jembatan Sambaliung akan bisa dilalui kendaraan roda dua pada 10 Agustus mendatang. Dan mengingatkan para ASN yang tinggal di Sambaliung untuk tidak terlambat masuk kerja.

"Tanggal 10 Agustus sudah dibuka untuk roda dua. Saat ini masih Saya toleransi untuk ASN yang tinggal di Sambaliung, walaupun finger terlambat tidak ada pemotongan gaji. Tapi kalau sudah dibuka jangan lagi terlambat," pintanya.

Sekitar 2-3 hari ke depan akan dilakukan pengaspalan Jembatan Sambaliung. Untuk sementara belum boleh dilalui kendaraan roda empat sebab masih ada pekerjaan penguatan struktur bagian bawah jembatan.

"Kalau itu sudah selesai baru kendaraan roda empat bisa lewat," tutupnya. (mnz)

Polda Kaltim Tangkap Pengedar Ganja di Balsel

BALIKPAPAN - Tim Operasional Subdit I Direktorat Narkotika Polda Kalimantan Timur berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja di wilayah Jalan Syarifuddin Yoes, Kelurahan Sepinggangan Baru, Balikpapan Selatan pada Minggu (6/8/2023) kemarin.

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, berdasarkan informasi yang diterima dari Direktorat Bea Cukai Kota Balikpapan, Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim mendapatkan laporan mengenai adanya peredaran narkotika jenis ganja di lokasi tersebut.

"Penyelidikan yang dilakukan oleh Subdit I dan personel Bea Cukai Kota Balikpapan mengarah pada identifikasi seorang yang dicurigai terlibat dalam peredaran narkotika," ujarnya, Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, pada saat yang bersamaan sekitar pukul 16.20 WITA, Subdit I Ditresnarkoba Polda Kaltim bersama personel Bea Cukai Kota Balikpapan berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang berada di depan kantor Lion Parcel Ruko Pelangi B Poin Blok D No 06-08 Sepinggangan Baru Balikpapan.

"Seorang pria tersebut kemudian diidentifikasi berinisial DD, lahir di Kota Balikpapan pada tanggal 3 Maret 1998," jelasnya.

Saat dilakukan penangkapan, Tim Operasional Subdit I berhasil mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan kasus ini. "Barang bukti yang berhasil disita antara lain adalah 1 buah plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 97 gram brutto, 1 plastik paket berwarna hitam, 1 unit ponsel iPhone 7 Plus berwarna hitam, 1 buah jaket berwarna hitam," tambah Yusuf.

Langkah-langkah tindak lanjut yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, Pemeriksaan lebih lanjut terhadap tersangka DD serta saksi-saksi terkait kasus ini.

"Kasus penyalahgunaan narkotika jenis ganja ini masih dalam tahap pengembangan oleh Subdit I Direktorat Narkotika Polda Kalimantan Timur," tegasnya.



Tersangka DD beserta barang bukti ganja yang ditemukan tim opsional Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Bea Cukai Kota Balikpapan.

Pihak kepolisian akan terus melakukan upaya-upaya investigasi untuk mengungkap lebih lanjut fakta-fakta terkait kasus ini serta memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (bom)



Bagan uji coba materi baru ujian praktik Surat Izin Mengemudi (SIM) C.

Tahap Sosialisasi, Materi Baru Ujian SIM C Tanpa Angka 8 dan Zigzag

BALIKPAPAN - Uji coba materi baru ujian praktik Surat Izin Mengemudi (SIM) C tanpa angka 8 dan zig-zag resmi dilaksanakan di wilayah Polda Kaltim sejak Senin (7/8/2023). Namun, untuk saat ini seluruh Sapras Lalu Lintas Polres jajaran masih dalam tahap sosialisasi.

Dirlantas Polda Kaltim, Kombes Pol Sonny Irawan melalui Kasubdit Regiden Ditlantas Polda Kaltim, AKBP Wahyu Endrajaya mengatakan, desain baru berupa lintasan sirkuit itu akan berlaku serempak pada pertengahan minggu pertama bulan Agustus 2023 ini.

"Berdasarkan instruksi Korlantas Polri ada ketentuan baru dalam uji praktek SIM C. Biasanya menggunakan seperti angka 8 dan zig zag, saat ini di revisi menjadi menyerupai huruf S seperti sirkuit," ujarnya, Senin (7/8/2023).

Lebih lanjut Wahyu Endrajaya menjelaskan, pada materi baru ujian praktik SIM C nantinya akan dilakukan pada lintasan berbentuk sirkuit yang spesifikasinya telah diperbarui dari

versi lama.

Dari denah yang diungkap Korlantas Polri, sirkuit ujian praktik SIM C memiliki tiga lintasan lurus dan lima area berbelok, yang satu bagiannya menyerupai huruf S.

"Saat uji praktik dimulai, pemohon SIM C akan masuk melalui garis start, lalu keluar dari sisi lainnya setelah menyelesaikan semua tantangan pada sirkuit itu," jelasnya.

Lintasan ini mengakomodir empat materi ujian praktik dengan ukuran yang sudah diperlebar dan tanpa materi zig-zag atau disebut juga slalom. Ujian angka 8 diganti ujian berbentuk huruf S.

"Yang pertama ini adalah lintasan lurus. Lintasan lurus ini kami kurangi jumlah patoknya sehingga yang tadinya jarak antar patok 200 cm menjadi 250 cm," tambahnya.

Setelah lurus, nantinya pemohon SIM akan diminta berhenti mengikuti lampu lalu lintas buatan yang dipasang di sana. Ini sekaligus menjadi sarana edukasi masyarakat mengenai aturan lalu lintas.

"Setelah itu di tahap yang kedua adalah u-turn atau putar balik. Untuk putar balik pun yang sebelumnya 400 cm, menjadi 500 cm. kemudian di tahapan etape ketiga, yang semula angka 8 diubah menjadi huruf S," ujar Wahyu lagi.

Setelah melalui trek huruf S, peserta kemudian kembali lagi melaju pada jalan lurus, lalu melaksanakan pengereman.

"Di sini patok-patok yang sebelumnya berjumlah banyak juga sudah sangat kami kurangi, sehingga diharapkan masyarakat pemohon SIM dapat lebih melaksanakan tes dengan tanpa takut melihat patok," jelasnya.

Wahyu menegaskan model uji praktik yang baru memang akan memudahkan masyarakat, namun tidak mengurangi tolak ukur Polri dalam melihat kompetensi berkendara dan keselamatan berkendara.

"Sehingga keselamatan tetap terjamin," tutupnya. (bom)



Kesepakatan Tercapai, PT Wika Janji Lunasi Pembayaran ke Pengusaha Lokal Bontang

BONTANG - Setelah gelombang protes yang direncanakan, Forum Peduli Pengusaha dan Pekerja Lokal Bontang dan PT Wijaya Karya (Wika) akhirnya duduk bersama dan menemukan titik temu. Demonstrasi yang seharusnya berlangsung Senin, (07/08/2023) batal menyusul adanya kesepakatan yang dicapai.

Dalam pertemuan di Rumah Makan Bontang Kuring pada Minggu, (06/08/2023), kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah pembayaran.

Dirut PT Graha Mandala Sakti Kahar Kalam, menyatakan kepuasannya atas kesepakatan yang telah dicapai.

“Kami merasa dihargai dengan kesediaan PT Wika untuk mendengarkan tuntutan kami dan berkomitmen untuk segera menyelesaikan pembayaran,” kata Kahar.

Ia menegaskan bahwa kesepakatan ini mencerminkan kepedulian terhadap pengusaha lokal Bontang yang telah memberikan kontribusi namun belum menerima haknya.

Salah satu poin penting dari kesepakatan tersebut adalah janji PT Wijaya Karya untuk menyelesaikan pembayaran kepada vendor dan pengusaha lokal pada periode 10-14 Agustus 2023, dengan batas akhir pelunasan pada 31 Oktober 2023.

Pertemuan tersebut tidak hanya di-

hadiri oleh perwakilan dari kedua belah pihak, tetapi juga oleh stakeholder lainnya seperti PT Pupuk Kaltim, Kapolres Kota Bontang, Yusep Dwi Prasetya, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bontang Shafa Muha.

Kahar Kalam, dalam kesempatan tersebut, juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam proses mediasi, khususnya kepada Kapolres Kota Bontang. “Kami berharap kerjasama positif ini dapat menjadi contoh bagi konflik-konflik serupa di masa depan,” pungkas Kahar. (MK)



Kepala BBPJK Kaltim Reiza Setiawan, saat menerangkan rencana pemangkasan tanjakan di Depan RSUD Bontang, kepada rombongan Komisi V DPR RI.

Komisi V DPR RI Kunjungi Bontang, Tinjau Tanjakan RSUD dan Bontang Kuala

BONTANG - Komisi V DPR RI melakukan kunjungan ke Kota Bontang, Senin (7/8/2023). Dalam kunjungan tersebut, Komisi V meninjau rencana pemangkasan tanjakan di Depan RSUD Taman Husada Bontang dan juga ke Bontang Kuala untuk penanganan banjir rob.

Anggota Komisi V DPR RI Irwan menerangkan, permasalahan tanjakan di depan RSUD Bontang menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan pengguna jalan. Kelerengan di jalan tersebut, kata Irwan, akan dipangkas di bawah 10 persen.

"Harus jadi prioritas. Dan kunjungan Komisi V ini menjadi pesan prioritas bahwa kita mau serius. 600 meter naik turun yang akan kita pangkas di bawah 10 persen. Dengan anggaran Rp70 miliar tetapi memang belum masuk. Sehingga kunjungan ini memastikan bahwa tahun depan," jelas Ketua DPD Demokrat Kaltim ini.

Irwan juga menyinggung soal banjir rob yang saban tahun menerpa Bontang Kuala. Menurutnya, penanganan

banjir di daerah bersejarah bagi Kota Bontang tersebut butuh analisa dan kajian yang mendalam. Ia pun memastikan akan memperjuangkan anggaran penanganan banjir tersebut di tahun 2024 mendatang.

"Jalan nasional sampai sini, masalahnya bukan nasionalnya saja tetapi kita harus melihat limpasan air laut. Jangan sampai kita tutup tanggul jalan tapi yang lain air bisa masuk," jelasnya.

"Bontang Kuala tunggu rancangan dari Dinas PU Bontang, nanti kita review. Kita datang memastikan di 2024, kita berjuang sama - sama," pungkasnya.

Sementara Kepala BBPJK Kaltim Reiza Setiawan menjelaskan pemangkasan akan dilakukan pada badan jalan di sisi kanan dari arah Tugu Selamat Datang, dengan panjang pemangkasan sekitar 600 meter dan ketebalan kurang lebih 10 meter. Metode penanganannya, jelas Reiza, akan dilakukan galian dengan pemasangan secant pile sebagai penahan tanah.

Saat ini, lanjutnya, tengah dilakukan pengkajian terkait Detail Engineering Design (DED) dengan target penyelesaian akhir tahun 2023 mendatang.

"Setelah DED selesai, kami dorong anggaran serta pengerjaan tahun depan. Anggaran yang diusulkan Rp70 miliar," jelasnya.

Terkait banjir rob di Bontang Kuala, Direktorat Bendungan dan Danau Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, menjelaskan bahwa persoalan banjir harus benar dikaji terkait penyebabnya agar penanganannya tepat. Rencanan penggunaan sistem parapet atau penghalang, katanya, bisa jadi lebih berbahaya.

"Kalau kita bicara banjir kita harus bicara sistem harus tau penyebabnya apa. Karena takut nanti sistem parapet itu lebih bahaya, karena airnya terjebak. Yang akan dilakukan adalah sistem pemompaan cuma akan memakan biaya yang cukup besar sehingga kajian ini kami harap sambil simultan," pungkasnya. (eky)



UNTAG
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA

**PENERIMAAN MAHASISWA BARU
PROGRAM DOKTOR (S-3)**

TAHUN AKADEMIK 2023 / 2024



@untagsurabaya



@untagsurabayaofficial



@kitauntagsby



bit.ly/ytuntagsby

PROGRAM STUDI

DOKTOR ILMU ADMINISTRASI (Akreditasi B)

DOKTOR ILMU EKONOMI (Akreditasi B)

DOKTOR ILMU HUKUM (Akreditasi B)

BIAYA PENDIDIKAN

RINCIAN & TAHAPAN	SMT GASAL	SMT GENAP	PEMBAYARAN
▶ DPP			Rp. 10.000.000
▶ Uang Kuliah Termin - I	Agustus	Februari	Rp. 7.500.000
▶ Uang Kuliah Termin - II	November	Mei	Rp. 9.500.000
▶ Uang Kuliah Termin - III	Februari	Agustus	Rp. 9.500.000
▶ Uang Kuliah Termin - IV	Mei	November	Rp. 9.500.000
▶ Uang Kuliah Termin - V	Agustus	Februari	Rp. 9.500.000
▶ Uang Kuliah Termin - VI	November	Mei	Rp. 9.500.000
TOTAL			Rp. 65.000.000

Catatan :

Apabila terjadi keterlambatan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, maka akan dikenakan denda sebesar Rp. 150.000

**DPP DAPAT DIANGSUR, ANGSURAN PERTAMA SEBESAR 50%,
SISANYA DIANGSUR SEBANYAK 5X DAN HARUS LUNAS
PALING LAMBAT PADA PEMBAYARAN TERMIN-VI**

- ▶ FORMULIR PENDAFTARAN : Rp. 500.000
- ▶ BIAYA KTM RFID : Rp. 25.000
- ▶ BIAYA HER-REGISTRASI PER-SEMESTER : Rp. 600.000
dibayar setiap awal semester (Agustus & Februari)
- ▶ BIAYA UJIAN PERBAIKAN : Rp. 150.000
(per Mata Kuliah)
- ▶ BIAYA DISERTASI diatur kemudian dalam keputusan
Pengurus Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya

PERSYARATAN

- ▶ Scan Ijazah S-1 dan S-2 Asli
- ▶ Scan Transkrip Nilai S-1 dan S-2 Asli
- ▶ Scan Rancangan Usulan Penelitian (maksimal 25 halaman)
- ▶ Scan KTP, KK & Akta Kelahiran Asli

Dokumen discan dalam format pdf/jpg, dan persyaratan asli dibawa pada saat melakukan daftar ulang

PENDAFTARAN

GELOMBANG - I

1 OKT. 2022 - 31 MARET 2023

GELOMBANG - II

1 APRIL - 30 JUNI 2023

GELOMBANG - III

1 JULI - 31 AGUSTUS 2023

TEMPAT PENDAFTARAN :

Graha Widya Lantai 1, Kampus UNTAG, Jl. Semolowaru 45 Surabaya

JADWAL LAYANAN :

Senin-Jumat, Pukul 08.00-14.00 WIB

HOTLINE PROGRAM S-2 & S-3

0813 5748 7129

HOTLINE PROGRAM D-3 & S-1

0811 300 1716

JOIN GROUP TELEGRAM

@pmbuntagsby2023

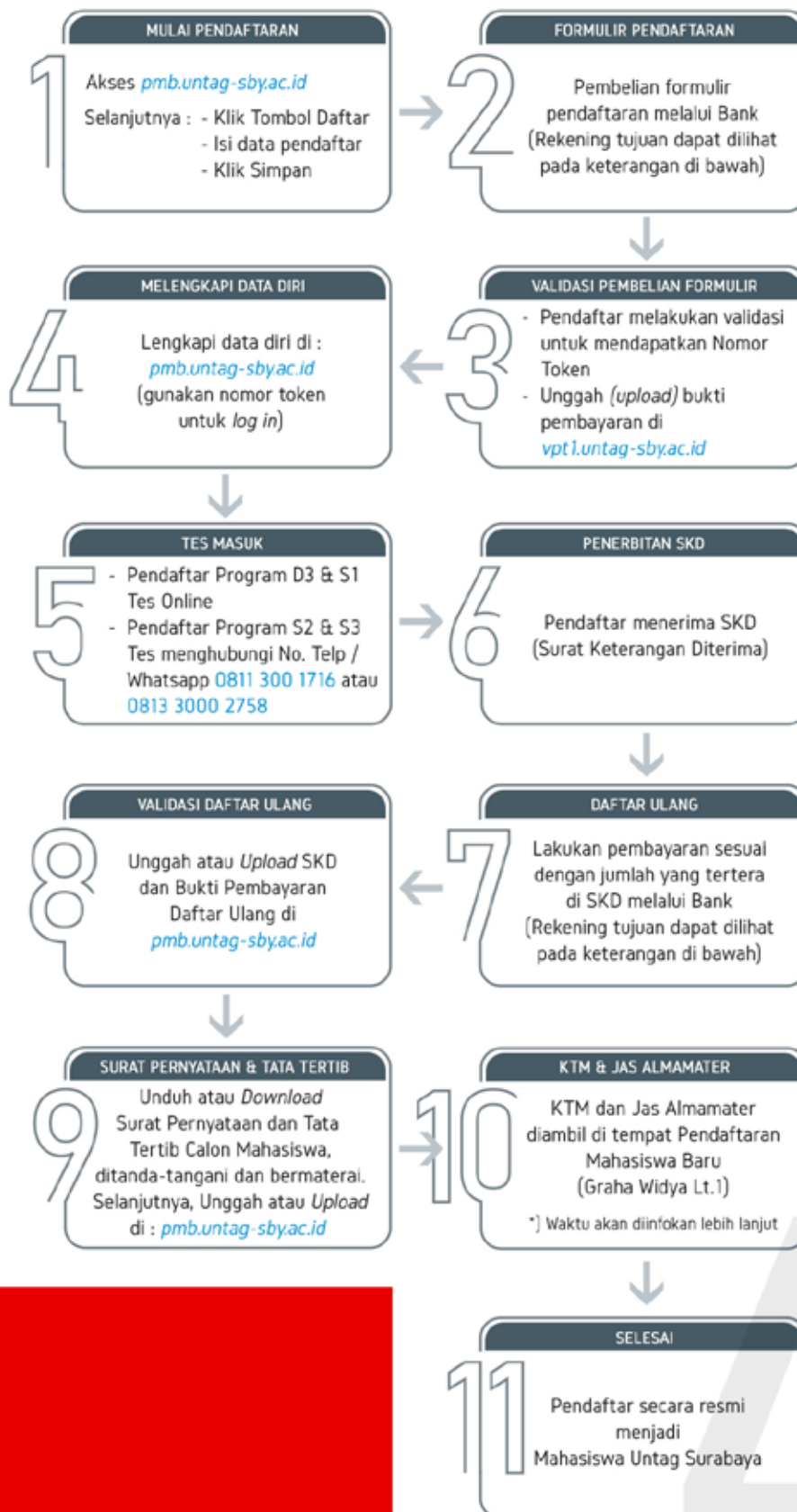
REKENING TUJUAN

UNTUK PEMBELIAN FORMULIR DAN PEMBAYARAN DAFTAR ULANG

- ▶ Program D3 & S1 Pembayaran melalui Teller Bank Jatim atau Transfer ke :
No. Rek. 0741002183 (Bank Jatim)
- ▶ Program S2 & S3 Pembayaran ke : No. Rek. 7917081945 (Bank BNI)

Rekening a.n. Yayasan Perguruan 17 Agustus 1945 Surabaya

ALUR PENDAFTARAN





UNIVERSITAS
17 AGUSTUS 1945
SURABAYA



CALLING FOR ALUMNI

POTONGAN DANA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BAGI KELUARGA BESAR ALUMNI UNTAG SURABAYA

- Anak alumni Untag Surabaya **Potongan DPP sesuai gelombang ditambah 5%**
- Alumni S1 Untag Surabaya yang melanjutkan S2 di Untag Surabaya **Potongan DPP 30%**
- Alumni S1 atau S2 Untag Surabaya yang melanjutkan studi S3 di Untag Surabaya **Potongan DPP 25%**



HOTLINE D3 & S1
0811 300 1716



HOTLINE S2 & S3
0813 5784 7129



JOIN GRUP TELEGRAM
@pmbuntagsby2023



@untagsurabaya



@kitauntagsby



fb.com/untagsurabayaofficial



youtube.com/untagsurabaya



@kitauntagsby

Koran
DIGITAL

MEDIA

KALTIM.com

Lebih Dekat dengan Satu Klik



<http://koran.mediakaltim.com/>

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033



media_kaltim



mediakaltimdotcom



mediakaltim.com



media kaltim



Pemkab Kutim Optimis Capai Serapan APBD P di KUA-PPAS 2023

SANGATTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) optimis penyerapan APBD Perubahan di Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2023 bisa tercapai.

Hal itu dikatakan langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono yang mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman pada Senin (7/8/2023).

Poniso menyampaikan hal tersebut saat menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan umum Fraksi-fraksi dalam dewan terhadap perubahan KUA-PPAS 2023 pada Sidang Paripurna ke-23 DPRD Kutim yang dipimpin Ketua DPRD Kutim, Joni dan dihadiri 22 anggota lainnya.

Meskipun hingga semester kedua ini (Juni) serapan anggaran hanya sebesar 26,33 persen, Pemkab Kutim tetap optimis serapan anggaran hingga akhir tahun 2023 bisa tercapai.

"Pertama, terkait rendahnya sera-

pan anggaran, kami (Pemkab Kutim) mengambil sikap tegas memonitor langsung beberapa satuan perangkat kerja yang masih minim angka serapannya, memperkuat koordinasi di lintas sektor, meminimalisasi hambatan administrasi. Kemudian terkait penanganan stunting, Pemkab Kutim tetap berkomitmen mengalokasikan anggaran yang ideal bagi sektor-sektor yang menangani stunting seperti Dinas Kesehatan, Ketahanan Pangan dan Pemberdayaan Perempuan," ujar Poniso.

Selain itu, Pemkab Kutim juga tetap fokus kepada rencana prioritas dan isu strategis terutama penyediaan air minum di kawasan perkotaan dan pedesaan, penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, peningkatan jalan tani, pembayaran gaji TK2D, gaji dan Tambahan Tunjangan Penghasilan (TTP) bagi PPPK penerimaan 2022 dan TTP bagi PNS.

"Pemetaan sudah dilakukan, apa saja isu strategis dan program kerja prioritas yang sudah disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif.

Hal-hal kebutuhan fundamental bagi masyarakat tetap difokuskan," tegas mantan Kabag Pembangunan ini.

Terkait proyek Multi Years Contract (MYC), Pemkab Kutim terus mengawal dan menguatkan koordinasi, agar proses tender dan administrasi lainnya berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Sistem tender sudah ada mekanismenya, namun jika ada kendala di lapangan tentu akan dikoordinasikan dengan baik. Jangan sampai terlambat, jika terlambat masyarakat akan terdampak. Karena proyek MYC ini biasa infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga," jelasnya.

Sementara pendapatan dari Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF - CF) akan digunakan sesuai dengan skema yang telah ditetapkan terutama untuk menjaga hutan tetap lestari dan program penghijauan berkelanjutan.

"Dana dari FCPF-CF ini sudah ada skemanya, penggunaan dan pertanggungjawabannya juga diawasi secara langsung oleh pihak terkait," ujarnya. (rkt3)



Jasad YS ditemukan gantung diri di kebun karet.

Seorang Pria Ditemukan Tewas Gantung Diri di Kebun Karet

PASER - Diduga karena masalah keluarga, YS (39) pria warga Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang memilih mengakhiri hidupnya. Ditemukan gantung diri di kebun karet, Senin (7/8/2023) sekira pukul 07.00 WITA.

Kapolsek Batu Sopang Iptu Harwanto mengatakan, ditemukannya jasad yang bergantung di sebuah pohon karet kebun milik sahal seorang warga. Mendapati informasi itu, personel kepolisian segera menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi.

"Setibanya di TKP ditemukan gantung diri menggunakan kabel di pohon karet," kata Harwanto.

Diduga YS gantung diri menggunakan seutas kabel hitam dengan sepanjang 1,5 meter. Saat ditemukan masih mengenakan kaos hitam dan celana pendek berbahan denim. "Kami lakukan evakuasi dengan dibantu warga setempat," jelasnya.

Segera korban dilarikan ke pe-

layanan kesehatan terdekat. Berdasarkan keterangan dokter jika tak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh YS. Namun diduga karena persoalan rumah tangga, hal ini usai ditemukannya surat wasiat dalam rumahnya.

"Kami menemukan surat wasiat yang ditinggalkan berisi permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga menduga bahwa itulah penyebab korban mengakhiri hidupnya," tutupnya. (bs)





Paser Kekurangan Guru dan Tenaga Kesehatan, Rekrutmen Formasi P3K Tidak Maksimal

PASER - Guru dan tenaga Kesehatan masih dibutuhkan di Kabupaten Paser. Minimnya tenaga pendidik dan tenaga kesehatan itu belum bisa dilakukan maksimal dalam proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Untuk diketahui belum lama ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) memerintahkan agar daerah mengusulkan formasi yang saat ini belum terisi penuh.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Paser, Katsul Wijaya, mengatakan terkait dengan rekrutmen tenaga medis dan pendidik khususnya mengisi formasi P3K, terdapat beberapa daerah yang sudah mengusulkan formasi itu, tapi belum penuh.

"Dalam arti belum dimaksimalkan usulan tersebut. Dikarenakan permasalahan dukungan anggaran," kata Katsul.

Dijelaskan Katsul, dalam per-

temuan yang berlangsung saat rapat koordinasi pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun anggaran 2023 bersama Kemenpan-RB, ada beberapa kabupaten yang menyampaikan permasalahannya, berkaitan dengan dukungan anggaran.

Beberapa daerah pun juga mengusulkan supaya pemerintah pusat juga menyiapkan dana khusus terkait dengan penganggaran untuk pendidikan dan kesehatan. "Memang kebutuhan kita (Paser) untuk mengisi formasi tersebut, inginnya penuh. Cuma dengan pertimbangan anggaran, tentunya secara bertahap. Insya Allah di tahun 2024," jelasnya.

Lebih lanjut ia menerangkan terkait dengan kebutuhan tenaga pendidik di Kabupaten Paser sejauh ini masih mengalami kekurangan. Hanya saja ada kebijakan yang membolehkan pemerintah daerah mengangkat guru pengganti di beberapa sekolah.

"Diharapkan dengan adanya guru

pengganti jangan sampai ada sekolah yang tidak memiliki guru sesuai dengan kebutuhan proses belajar mengajar. Kebutuhan ini masih sangat besar, meskipun kita usulkan melalui PPPK jumlahnya masih saja kurang," lanjut Katsul.

Begitu pula Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun. Diharapkan setelah dengan kondisi normal nanti, secara alami akan diantisipasi melalui adanya pertumbuhan positif jumlah guru. "Jika pensiun satu guru bisa segera tergantikan dengan guru baru yang masuk," ungkap dia.

Dari situ Pemerintah Daerah telah memiliki perencanaan adanya penambahan jumlah sekolah dengan penambahan penduduk.

"Tentu kebutuhan tenaga medis dan tenaga pendidik terus bertambah. pertumbuhan ini kita harapkan positif, berapa jumlah pensiun juga harus seimbang dengan jumlah guru baru yang masuk," tandasnya. (bs)



DEDDY/RADARMEDIA

Kepala Badan Kesbangpol PPU, Agus Dahlan saat diwawancarai

Kesbangpol PPU Siap Gelar Sosialisasi Partisipasi Pemilu 2024 di 4 Kecamatan

PPU-Dalam meningkatkan partisipasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Penajam Paser Utara (PPU) akan segera lakukan sosialisasi di 4 Kecamatan PPU. Dalam Peraturan Bupati (Perbup) 2022/38 berisi tentang peningkatan partisipasi pemilih melalui sosialisasi kegiatan pemilu.

Kepala Badan Kesbangpol PPU, Agus Dahlan mengatakan dalam kegiatan sosialisasi nanti akan berfokus kepada masyarakat PPU khususnya untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilu 2024. Dikarenakan satu suara itu sangatlah berharga dalam menentukan pemimpi masa depan.

“Berdasarkan Peraturan Bupati, kita berkewajiban untuk melakukan sosialisasi ke pada masyarakat di empat kecamatan. Terhadap partisipasinya pada Pemilu 2024 mendatang,” ujarnya, Senin (7/8/2023).

Agus mengungkapkan kesulitan masyarakat PPU untuk berpartisipasi dalam pemilu itu ialah, adanya masyarakat yang bekerja. Baik di dalam maupun di luar daerah. Maka dari itu, kesulitan inilah yang nanti menjadi titik fokus sosialisasi.

“Kita akan berusaha semaksimal mungkin agar partisipasi masyarakat terhadap pemilu bisa mencapai angka yang diinginkan,” ungkapnya.

Adapun target partisipasi masyarakat

terhadap Pileg dan Pilpres 2024 ditetapkan di angka 79 persen. Sedangkan untuk Pilkada hanya 72 persen.

Namun secara pribadi, target yang partisipasi ditetapkan Badan Kesbangpol PPU di angka 80. Karena di antara 10 kabupaten/kota se-Kaltim, PPU masih termasuk yang paling tinggi untuk partisipasinya pemilu.

“Kita berharap dengan adanya sosialisasi yang akan dilakukan ini, dapat memberikan kenaikan persentase partisipasi pemilunya. Pasti dengan berbagai cara apapun atas pentingnya partisipasi masyarakat tersebut untuk menentukan pemimpin masa depannya,” pungkas Agus. (nrd)



DEDDY/RADARMEDIA

Suasana latihan membawa baki bendera merah-putih Capas PPU.

Masa Karantina Paskibraka PPU, Mulai Seleksi Pembawa Baki Bendera

PPU-Pelaksanaan karantina pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) Penajam Paser Utara (PPU) memasuki hari ke-4. Mental dan fisik para calon paskibraka dalam masa ini mulai terbentuk.

Pelatih Paskibraka PPU, Untung Waluyo mengatakan pada hari pertama memang para Calon Paskibraka (Capas) PPU banyak yang tumbang. Dalam artian tidak sanggup melanjutkan pelatihan.

Akan tetapi memasuki hari ke 4 karantina mental dan fisik sudah terbentuk. "Wajarlah namanya juga hari pertama karantina, pasti banyak

yang tumbang. Per hari ini, alhamdulillah mental dan fisik sudah mulai terbentuk," ujarnya, Senin (7/8/2023).

Lanjut untung, pihak pelatih ke depannya akan lebih memaksimalkan porsi latihan. Mengingat waktu latihan yang begitu singkat.

Langkah demi langkah sudah dijadwalkan. Dalam waktu dekat ini pun pihaknya akan segera bergabung dengan pasukan pengawal 45 yang berasal dari institusi Polri.

"Mengingat waktu yang begitu singkat, kami segera bergabung dengan pasukan 45 untuk melakukan persamaan langkah," ungkapnya.

Adapun saat ini tim pelatih telah melakukan penunjukan para capas yang mengisi posisi pembawa baki dan pengibar bendera. Adapun kriteria pembawa baki dan pengibar tersebut bukan hanya terlihat dari wajah saja, akan tetapi turut melihat dari respon cepat serta ketanggapannya.

"Di hari ke-4 ini kami sudah mulai memilih calon pembawa baki dan pengibar benderanya. Bukan hanya wajah yang kami lihat akan tetapi ketangkasan, ketanggapan dan kecerdasannya di hadapan bendera adalah salah satu syaratnya," pungkas Untung. (nrd)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Prosesi penandatanganan Mou Pemkab PPU dan Kanwil DJPb Kaltim, Senin (7/8/2023).

Gandeng Kanwil DJPb Kaltim, Pemkab PPU Bakal Ubah OPD Layanan Publik Jadi BLUD

PPU - Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) merencanakan untuk meningkatkan layanan publik dengan menjadikan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) badan layanan umum daerah (BLUD). Nantinya, dengan adanya keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan melalui sistem ini mampu menciptakan pelayanan publik yang baik dan sehat.

Guna mendukung pembinaan BLUD, Pemkab PPU menjalin Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim. Bertempat di Aula Lantai III Setkab PPU Senin (7/8/2023), penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Bupati PPU Hamdam dan Kepala Kanwil DJPb Kaltim Syaibani.

Hamdam mengungkapkan adanya kesepakatan kerjasama ini menjadi hal baik bagi pemerintah daerah. Termasuk pencerahan dalam pengem-

bangunan BLUD yang ada di PPU.

Terlebih pada pendampingan secara langsung pengoperasian sistem pelaksanaannya. Baik yang berkaitan dengan ketentuan dan regulasi yang mengaturnya.

"Karena tidak dapat dimungkiri, tuntutan pelayanan semakin harus lebih baik seiring perkembangannya," ujarnya.

Ia juga mengharapkan adanya pembinaan ini pada sejumlah BLUD nantinya dapat semakin memajukan dan menyehatkan layanan publik. Hal ini guna memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat.

"Karena tidak dapat dimungkiri, ada beberapa layanan yang sudah harus dijadikan BLUD agar lebih efisien. Kesepakatan bersama ini tentunya menjadi bagian penting bagi OPD terkait sejumlah layanan umum di lingkungan Pemkab PPU. Baik secara pedoman, teknis pelaksanaan maupun penggunaan anggarannya

yang sesuai dengan ketentuan yang ada," terangnya.

Sekadar informasi, BLUD ialah sistem yang diterapkan pada OPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Lebih lanjut, diungkapkan pula adanya kesepakatan bersama ini semakin memberikan kemudahan dan pemahaman yang menyeluruh kepada OPD yang ada. Sehingga ke depan sejumlah BLUD yang sudah ada dan bakal ada dapat semakin berkembang dan maju sesuai dengan standar pelayanan telah ditentukan.

"Termasuk terbentuknya BLUD yang lain di sejumlah OPD, seperti yang saat ini telah ada di RSUD Ratu Aji Putri Botung," pungkasnya. (sbk)



ROBBI/MEDIAKALTIMGROUP

Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor saat menghadiri malam Grand Final Duta Wisata Benuo Taka 2023, Sabtu malam lalu.

Syahrudin Harap Duta Wisata 2023 Mampu Promosikan Kepariwisataaan Daerah

PPU - Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahrudin M Noor berharap Duta Wisata Benuo Taka 2023 dapat menjalankan mandatnya sebagai promotor sektor kepariwisataan daerah. Untuk mengenalkan objek wisata yang ada di PPU ke jejaring yang lebih luas.

Ia turut hadir dalam malam Grand Final Duta Wisata Benuo Taka 2023 yang digelar di Pantai Istanan Amal, Sabtu (5/8/2023) lalu. Syahrudin menyatakan, duta wisata memiliki peran penting dalam mempromosikan sektor pariwisata di PPU.

"Kami berharap agar pemenang

agar kiranya nantinya dapat mempromosikan wisata yang ada di PPU, dengan berbagai destinasi yang menarik hingga ke internasional," katanya, Senin (7/8/2023).

Adapun Agus Santoso dan Nur Diana Amiati terpilih sebagai Duta Wisata Penajam Paser Utara 2023 serta Alika Zahra, didapuk menjadi Puteri Pariwisata 2023. Dalam setahun ke depan, mereka diberikan mandat untuk membawa wajah kepariwisataan daerah Serambi Nusantara.

Syahrudin juga berharap, agar para duta wisata di seluruh bidang mam-

pu dapat terus membanggakan daerah Benuo Taka. Serta berkontribusi terhadap masyarakat melalui komitmen memajukan sektor pariwisata daerah.

Untuk diketahui pula, Duta Wisata Benuo Taka yang terpilih ini juga dipersiapkan untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi. Mewakili PPU dalam mengikuti pemilihan serupa di tingkat provinsi maupun tingkat Nasional.

"Yang terpilih harus bisa membawa harum nama PPU di bidang pariwisata," tutupnya. (sbk)

Apel Diluar Jam Sekolah Ditolak Orangtua, Asli Nuryadin Imbau Program Sekolah Perhatikan Aspek Kesehatan Siswa

SAMARINDA – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin mengimbau agar setiap sekolah yang menerapkan program sekolah sepanjang hari (full day school) untuk jenjang SMP agar melihat sisi kesehatan.

Hal ini diungkapkan setelah adanya laporan bahwa ada siswa SMPN 13 Samarinda Utara yang sakit karena diwajibkan apel di siang hari setelah jam belajar usai dengan alasan mengasah kedisiplinan siswa.

“Setiap siswa itu tidak semuanya kondisi kesehatannya sama dan tidak semua kuat kalau harus sampai siang hari, jika disuruh harus baris-berbaris di terik matahari,” ujarnya, Senin (7/8/2023).

Oleh sebab itu, Asli menegaskan agar semua sekolah yang menerapkan sistem full day school memberikan tindakan khusus bagi siswa yang dari sisi kesehatan memang tidak kuat fisiknya. “Ya, yang memang tidak kuat enggak harus ikut baris-berbaris,” katanya.

Menurutnya, sistem full day school ini secara umum ia nilai memberikan manfaat bagi siswa. Namun sekolah tetap harus memperhatikan aspek kesehatan siswa. Utamanya bila menambahkan kegiatan tambahan setelah jam belajar usai.

“Tapi tetap harus memperhatikan aspek-aspek yang lain jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan pada siswa akibat program itu,” ujarnya.

Dia juga mengingatkan para orang tua atau wali murid, jika ada permasalahan di sekolah maka dapat menyelesaikannya bersama komite sekolah.

“Untuk wali murid yang mungkin anaknya fisiknya tidak kuat harus melapor ke paguyuban dan komite di sekolah. Dan jika tidak selesai nanti saya yang turun bantu menyelesaikan,” pungkasnya.

Sebelum berita ini diterbitkan, Media Kaltim mendapatkan laporan berupa surat yang dikirim via WhatsApp yang mengungkapkan ada murid yang sakit karena kegiatan full day school yang ditambah program apel siang sebelum diperbolehkan pulang.

Wali Murid SMPN 13 Samarinda Utara itu, Adhi Abdhian melaporkan, anaknya jatuh sakit lantaran harus mengikuti kegiatan apel pada disekitar jam 14.30 hingga 15.00 WITA. Adhi juga protes karena apel siang ini, tidak masuk dalam pembahasan Komite sekolah sebelumnya. Bahkan tanpa pemberitahuan dan persetujuan orang tua siswa. Apel digelar diluar jam sekolah. Artinya, siswa semakin lama tertahan di sekolah.

“Kegiatan ini tidak mendidik, menjemur anak di tengah cuaca ekstrem saat ini, apa gunanya? Kalau mau apel, ya pagi saja disaat anak-anak masih segar fisik & otaknya. Banyak cara efektif kok dalam mendidik disiplin siswa. Ingat, cuaca sedang panas-panasnya, masak tega siswa dijemur begitu? Tanpa izin pula dengan orangtuanya,” protes Adhi.

Saat menyampaikan keberatan dan penolakannya, Kamis (3//2023), ia menemui Muhammad Nur, bagian

kurikulum dan Refika Wisfariah, bagian kesiswaan SMPN 13. “Saya sempat keras dipertemuan itu karena bidang kesiswaan menganggap menjemur anak itu hal biasa. Meski akhirnya, program apel itu akan dievaluasi karena tak bisa langsung diubah. Sedangkan saya, tegas jangan sampai siswa dijemur lagi. Seperti tentara saja. Kasian anak-anak itu. Sudah lelah belajar seharian, kelaparan, eh malah dijemur,” tambah Adhi.

Menurutnya pada surat penolakan itu, tak ada kajian kedokteran yang menyatakan menjemur anak di siang hari antara pukul 14.30 hingga 15.00 Wita, akan meningkatkan kecerdasan dan disiplin anak.

“Pihak sekolah tidak mempertimbangkan dampak buruknya bagi anak. Kalau terjadi apa-apa, memang sekolah mau tanggung jawab? Yang saya keberatan, apel itu tak pernah disampaikan ke orang tua siswa dan tanpa persetujuan komite sekolah, juga tak ada dalam jadwal yang di share ke wali siswa,” katanya.

Saat dikonfirmasi media ini, Muhammad Nur bagian kurikulum SMPN 13, meminta Media Kaltim langsung datang ke sekolah untuk penjelasan detail.

“Saya lagi nyetir Pak. Besok saja wawancaranya langsung datangi bagian humas sekolah, pak ya,” pintanya. **(han)**



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda, Asli Nuryadin

Perumdam Tirta Kencana Sebut Debit Air Baku Masih Aman

SAMARINDA-Masuk musim kemarau, terjadi penurunan debit air yang biasa didistribusikan. Warga Samarinda mulai risau dengan keadaan ini lantaran khawatir terjadi kekeringan seperti tahun 2014 lalu.

Pihak Perumdam Tirta Kencana tidak tinggal diam dalam menangani masalah ini. Mereka terus memantau dan membuat perencanaan cadangan untuk mengamankan kebutuhan air.

"Besok atau lusa akan dilakukan pengecekan lagi untuk memastikan debit air yang tersedia," ujar Asisten Manajer Meter dan Pelayanan Wilayah I, Sendya Ibanez kepada MediaKaltim.com, Senin (7/8/2023).

Dia menjelaskan, hingga saat ini belum bisa dipastikan sampai kapan krisis ini dapat diatasi. Namun menurut perkiraan ketersediaan air untuk beberapa hari ke depan masih aman.



Kantor Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda.

"Untuk beberapa hari ke depan debit air masih relatif aman. Apabila dibantu dengan pasang surut air laut dan kemarin sempat ada hujan," jelasnya.

Walaupun masih aman dan sejauh

ini masih dapat diatasi, masyarakat Samarinda tetap diimbau untuk menghemat air bersih. Agar distribusi air baku dapat terkendali dan menyeluruh. (acc)



LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digiroom



Kode Promo
BTSOLI

DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNTETIC SETIAP SERVICE BERKALA*



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

*Syarat dan ketentuan berlaku

Urusan Toyota lebih mudah!



AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Irma Suryani (kedua dari kanan) didampingi tim kuasa hukumnya saat melaporkan seorang oknum anggota DPRD Kaltim di Mapolresta Samarinda.

Dugaan Penipuan Beli Properti, Pengusaha Samarinda Laporkan Oknum DPRD Kaltim, Merugi Hingga Ratusan Juta

SAMARINDA - Seorang wanita yang merupakan pengusaha asal Samarinda bernama Irma Suryani kembali mendatangi Polresta Samarinda, Senin (7/8/2023). Kali ini, ia mendatangi Polresta Samarinda dalam maksud melaporkan seorang oknum anggota DPRD Kaltim berinisial S.

Pelaporan ini dilakukan Irma lantaran ia merasa ditipu usai membeli properti milik terlapor dalam bentuk rumah yang berada di Jalan Adam Malik, Kecamatan Sungai Kunjang, pada tahun 2019 silam dengan nominal Rp 400 juta.

Irma merasa ditipu, pasalnya baru setahun dibeli ternyata rumah tersebut berstatus sengketa, dan bahkan sudah digugat sejak tahun 2018.

"Saya baru tahu itu, kalau dari 2018 rumah itu sudah digugat," ucap Irma saat diwawancarai awak media di Polresta Samarinda.

Bagaikan beli kucing dalam karung, Irma merasa ditipu oleh S. Padahal kala bersepakat di kantor notaris, S mengaku jika rumah yang dijualnya itu sama sekali tak ada masalah atau bahkan berkasus.

"Jadi saat di notaris itu sempat ditanyakan Pasal 2, dan dijawab bahwa rumah yang dijual tidak dalam sengketa atau jaminan dan lainnya," ungkap Irma.

Irma semakin kesal setelah dirinya menerima kabar dari pengadilan jika rumah yang dibelinya itu akan dieksekusi. Karena, penggugat yang mengajukan gugatan pada tahun 2018 lalu menang atas S.

"Putusan pengadilan itu baru, sekitar Februari atau Maret 2023 dan mau dieksekusi," jelas Irma.

Sejak itu, Irma mencoba untuk berkomunikasi dengan S, namun tak digubris. Karena tak ada kabar pertanggungjawaban dari S, Irma

yang kadung kesal akhirnya membuat laporan penipuan ke Polresta Samarinda, berharap mendapatkan keadilan.

"Sekarang upaya saya ini melakukan pelaporan penipuan. Laporan sudah dari 24 Juli 2023. Saya datang untuk menanyakan progresnya, penyidik siapa, berkasnya sudah di mana dan seperti apa. Jawabannya masih di ruangan kasat serse," sebutnya.

"Harapan saya polres tanggap ini dengan sungguh-sungguh, tidak ada SP3 karena ini jelas penipuannya," tandasnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Samarinda, Kompol Rengga Puspo Saputro mengatakan bahwa pihaknya masih akan memeriksa laporan Irma. "Iya ini kami cek dulu sebentar," singkatnya. (vic)

Diduga Langgar Aturan, Iklan Kampanye Partai Perindo di RCTI Diselidiki Bawaslu Kaltim

SAMARINDA - Partai Perindo diduga melanggar aturan kampanye dengan menayangkan iklan berbau kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, melalui media televisi nasional.

Dugaan pelanggaran ini ditemukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Timur saat menonton tayangan televisi.

Galeh Akbar Tanjung, Kordiv Pencegahan, Humas dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kaltim, mengungkapkan bahwa Partai Perindo telah menayangkan iklan kampanye melalui RCTI dan diduga melanggar aturan kampanye di luar jadwal. "Karena locus-nya di sini, maka ini menjadi temuan Bawaslu Kaltim,"

ujar Galeh, Senin (7/8) malam.

Galeh menjelaskan, waktu dan lokasi penayangan iklan kampanye telah diatur dalam Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. "Iklan di media cetak dan elektronik hanya boleh dilakukan 21 hari sebelum masa tenang," tegasnya.

Saat ini, Bawaslu sedang melakukan proses penanganan pelanggaran dan akan berkoordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim. Galeh menambahkan, "Besok (8/8) kami akan berkoordinasi dengan KPID. Karena selain pelanggaran yang dilakukan Partai Perindo, diduga ada pelanggaran lainnya yang dilakukan media elektronik, dengan menyiarkan

iklan kampanye."

Dalam tayangan rekaman video yang diabadikan melalui handphone, potongan iklan tersebut menarasikan ajakan. "Ada kalimat 'Mari berjuang bersama Partai Perindo'. Kalimat ini jelas mengandung unsur ajakan dan dilarang, karena dugaan kampanye," tegas Galeh.

Metode kampanye telah diatur dalam Pasal 275 dan 276 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kampanye melalui iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet hanya boleh dilakukan selama 21 hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang. (MK)



Resmi Pimpin DPD IKAL Lemhannas Kaltim 2023-2028, Sri Wahyuni Tekankan Kerjasama dengan Pemprov dan Perguruan Tinggi

SAMARINDA - Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Keluarga Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (IKAL – Lemhannas) periode 2023 – 2028 yang dipimpin Sri Wahyuni resmi dilantik.

Pelantikan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (7/8/2023). Pelantikan dikukuhkan Ketua Umum IKAL Lemhannas Pusat, Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar.

Setelah pelantikan, Sri Wahyuni, yang juga menjabat sebagai Sekdaprov Kaltim, mengungkapkan rasa bangganya atas kehadiran Jenderal TNI (purn) Agum Gumelar dan Sekjend IKAL Lemhannas Pusat, Marsdya TNI (Purn) Daryatmo. "Kehadiran keduanya memberikan semangat baru bagi kami dalam mengembang-

kan organisasi IKAL di Kaltim," ucap Sri Wahyuni.

Sri Wahyuni menegaskan bahwa IKAL Kaltim bukan hanya sebagai tempat berkumpul alumni, tetapi juga sebagai mitra Pemprov Kaltim. Tujuannya adalah mendukung upaya pemerintah pusat, Lemhannas, dan pemerintah daerah dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebangsaan.

"Kami berencana merancang MoU dengan Perguruan Tinggi dan Pemprov Kaltim. Ini terkait kerjasama kajian dan pementapan nilai-nilai wawasan kebangsaan bagi mahasiswa baru dan tokoh masyarakat di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kabupaten Penajam Paser Utara," tambahnya.

Ketua Umum IKAL Lemhannas Pusat, Jenderal TNI (purn) Agum Gu-

melar, memberikan dukungan penuh atas program kerja IKAL Kaltim. Ia menekankan pentingnya anggota IKAL sebagai garda pemersatu bangsa, terutama menjelang Pilpres 2024. "Pengurus IKAL yang baru dilantik harus menerima amanah ini dengan penuh kepercayaan dan kehormatan," tegas Agum Gumelar.

Mantan Menkopolkam ini juga mengingatkan bahwa IKAL harus selalu berpegang pada satu keyakinan, yaitu bahwa setiap pemimpin di negeri ini memiliki cara memimpin yang berbeda, namun dengan tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan rakyat.

"Kami selalu melakukan kajian setiap tahun. Meskipun hasilnya mungkin tidak selalu disukai pemerintah, kami menyampaikannya dengan cara yang elegan dan terhormat," ungkapnya. (MK)

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN
* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

GUARANTEE PALING HEMAT GUARANTEE

Informasi - Call/WA :
Adi S : 0822-5435-0088

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang



Perwakilan Warga Perumahan KORPRI, Loa Bakung Samarinda.

Ingin Kepastian Status Lahan, Warga Perum KORPRI Bersurat ke Komisi II DPRD Kaltim

SAMARINDA - Warga Perumahan KORPRI di Jalan Jakarta, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, mengharapkan soal status lahan yang ditempati "clear" tanpa ada persoalan di kemudian hari.

Warga yang diwakili Neneng Herawati yang merupakan Ketua Forum Perempuan Peduli Perum Korpri Loa Bakung (FPPPKLB) meminta kepada Pemprov Kaltim untuk mendengarkan aspirasi mereka.

Ia menerangkan, lahan yang kini menjadi perumahan tersebut dulunya direncanakan dibangun Bandara oleh Pemprov Kaltim. Namun karena dianggap tidak cukup layak, akhirnya Pemprov Kaltim menggandeng KORPRI untuk pembangunan perumahan dengan bekerja sama dengan pihak pengembang dan perbankan.

Neneng mengakui warga yang bermukim di Perumahan KORPRI juga

tidak sebatas mereka yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja, melainkan banyak juga non PNS yang tinggal di sana karena banyak rumah yang sudah diperjual-belikan.

Dengan latar belakang tersebut, para warga khawatir bila status lahan tersebut tak ditingkatkan bakal merampas hak masyarakat yang berhuni di sana.

"Kami sudah lunas pembayaran kredit rumahnya, kami bayar ke BTN. Kami mau menaikkan (status ke SHM) saja enggak bisa, perpanjangan HGB enggak bisa, besok-besok kalau kami diusir atau apa, gimana?" terangnya kepada awak media.

Ia pun mengaku telah bersurat ke DPRD Kaltim, untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPRD Kaltim, dan beberapa pihak terkait dengan harapan ada titik terang terkait status lahan yang mereka tempati.

"Kami masukan permohonan pada 20 Juni lalu, informasinya dewan akan menemui kami di Agustus ini," ungkapinya.

Menanggapinya, Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengaku telah menerima permohonan dari warga Perum KORPRI.

"Memang ada saya terima beberapa minggu lalu dan sudah dijadwalkan. Permohonan RDP yang masuk ke Komisi II ini kan cukup banyak," sebutnya.

Terkait polemik ini, ia menganggap ada kesalahan dalam proses awal keberadaan perumahan KORPRI. Sehingga akhirnya terjadi kegiatan jual beli lahan di kawasan tersebut.

"Nanti kita coba perdalam lagi kemudian apa yang bisa dikerjakan dan dilakukan. Karena memang kalau tidak cepat diselesaikan yang begitu-begitu saja dan tidak bisa menjadi SHM," pungkasnya. (eky)



FOTO : KEMENDIKBUDRISTEK

KEBANGGAAN : Melalui Pergelaran Angklung terbesar di dunia yang dimainkan oleh 15.110 peserta, Indonesia berhasil mencetak rekor dalam Guinness World Records pada Sabtu (5/8/2023).

15.110 Orang Mainkan Angklung di GBK, Indonesia Berhasil Pecahkan Rekor Dunia

JAKARTA - Angklung, alat musik tradisional dan juga merupakan salah satu warisan budaya Indonesia berhasil menorehkan nama Indonesia dalam Guinness World Records (GWR). Pasalnya, alat musik yang terbuat dari bambu ini berhasil dimainkan oleh 15.110 peserta secara bersama-sama di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada Sabtu (5/8/2023).

Pergelaran akbar ini dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju.

Dalam event akbar tersebut, seluruh peserta memainkan lagu "Berkibarlah Benderaku" dan "Wind of Change" selama 7 menit dan mampu menyuguhkan harmoni musik yang indah. Penilai resmi dari GWR,

Sonia Ushiroguchi, mengapresiasi bahwa pertunjukan ini menyuguhkan harmoni dari instrumen musik angklung yang indah dan hasil kerja tim yang luar biasa.

Saat mengumumkan hasilnya, Sonia mengonfirmasi bahwa pemecahan rekor tersebut berhasil dilakukan dengan jumlah peserta 15.110 orang. Rekor dunia untuk pertunjukan angklung terbesar sebelumnya tercipta di Monumen Washington, Washington D.C., Amerika Serikat, pada 9 Juli 2011 dengan melibatkan 5.182 peserta.

"Bulan lalu Indonesia sudah memiliki 124 Guinness World Records. Jakarta punya 13 rekor. Saya dapat pastikan bahwa dengan 15.110 peserta, Indonesia telah mencapai pemecahan rekor," ujar Sonia saat membacakan hasilnya

dan langsung disambut riuh tepuktangan seisi stadion.

Di balik kesuksesan pertunjukan ini, Franka Makarim—istri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim bisa dikatakan sebagai salah seorang yang mempersiapkan seluruh peserta sehingga mampu menyajikan pertunjukan yang luar biasa.

"Pergelaran ini dipersiapkan dengan serius sejak Oktober 2022 dengan melibatkan berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan semangatnya untuk keberhasilan ini," jelas Franka.

Menurutnya, pertunjukan ini tidak mungkin terwujud tanpa kekompakan seluruh peserta yang berasal dari berbagai kalangan yang telah

bersedia untuk tekun berlatih selama 3 bulan lamanya.

"Hari ini kita dapat menyaksikan buah dari proses panjang yang telah dilalui, kita berhasil memecahkan rekor dunia GWR," imbuhnya.

Diketahui, pagelaran ini diinisiasi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam rangka melestarikan alat musik angklung dan mendukung para seniman yang sempat terdampak saat pandemi.

Peserta pertunjukan angklung terbesar di dunia ini datang dari berbagai kalangan, mulai dari pengurus OASEKIM, murid sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah kedinasan, perwakilan kementerian/lembaga, hingga para Ibu Dharma Wanita Persatuan dan Tim Penggerak PKK.

"Persiapannya lumayan lama. Berbulan-bulan kita persiapan dan itu kita latihan terus dan serius latihan untuk mengejar rekor dunia", kata Renaldi salah satu peserta pemecahan rekor GWR yang merupakan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Peserta lainnya, Dian yang berasal dari Dharma Wanita Persatuan mengungkapkan perasaan senang, bangga, dan merupakan pengalaman berharga menjadi bagian dari pertunjukan

angklung terbesar di dunia yang berhasil memecahkan rekor GWR.

Proses penilaian GWR yang berlangsung selama satu jam, diisi oleh hiburan dari Salma, pemenang Indonesian Idol 2023, Saung Angklung Udjo, dan Kahitna yang mampu melepas ketegangan para peserta dan ikut bernyanyi serta menari bersama. Tidak hanya itu, para undangan, termasuk Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, juga mendapat kejutan untuk bermain angklung bersama seluruh peserta dengan lagu "Mengejar Matahari".

Sementara itu, Direktur Perfilman, Musik, dan Media Kemendikbudristek, Ahmad Mahendra menambahkan, persiapan pagelaran ini sudah dilakukan sejak Oktober 2022 turut didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Angklung merupakan warisan budaya Indonesia yang sudah diakui UNESCO sejak 16 November 2010 dan memiliki nilai-nilai baik pendidikan karakter yang harus dilestarikan dan diturunkan ke generasi selanjutnya. Pertunjukan ini diharapkan menjadi momentum untuk menumbuhkan kecintaan generasi muda

terhadap alat musik Angklung," jelas

Mahendra menyebutkan, Kemendikbudristek memfasilitasi 20.060 unit Angklung dan mendistribusikan ke 381 kelompok angklung yang tiap kelompok beranggotakan 40 orang. Menggandeng Saung Angklung Udjo (SAU) sebagai mitra, Kemendikbudristek juga turut menyusun konsep musikalitas, video konduktor, dan pelatihan angklung bagi seluruh peserta.

Tak hanya itu, Kemendikbudristek juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten mengumpulkan 1.000 peserta yang berasal dari 25 sekolah.

"Selain dilatih langsung oleh tim SAU, kami juga melibatkan 182 orang supervisor yang telah dilatih sebelumnya oleh SAU untuk mendampingi pelatihan mandiri di tiap kelompok. Supervisor ini berasal dari guru seni musik dan seniman angklung dari sanggar atau komunitas," jelas Mahendra.

"Kami yakin upaya perjuangan bersama ini menjadi pemicu untuk melekatkan budaya pada generasi bangsa dan menginspirasi dunia dalam menghadapi tantangan global," tambah Pimpinan SAU, Taufik Udjo. (cha)

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Wigen Azanua No. 2200, Bontang Baru, Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!



toko.radarmedia.id

MK·CO



MEDIA KALTIM GROUP